

PROSIDING

VENNAS AIHII

KONVENSI NASIONAL
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif
Hubungan Internasional

Makassar, 23 November 2016



ISSN: 2549-6689



9 772549 668881

Dewan Redaksi

Advisor

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII), Tirta N. Mursitama.
- (2) Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, H. Darwis

Head of Editorial Board

Ishaq Rahman

Editor

Pusparida Syahdan
Agussalim Burhanuddin
Ashry Sallatu
Aswin Baharuddin
Nur Utaminingsih

Desain-Layout

Satkar Ulama

Diterbitkan oleh:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin

bersama

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII)

Disclaimer

Setiap paper dalam prosiding ini adalah hasil karya masing-masing penulisnya sebagaimana tercantum pada setiap paper. Sebagai karya akademik, setiap penulis adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap validitas data, analisis, dan kesimpulan, serta terhadap keseluruhan isi paper.



Sambutan Pengurus Pusat AIHII

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya Konvensi Nasional (Vennas) ke-7 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) pada tanggal 23 – 24 November 2017 dengan lancar dan sukses. Salah satu bukti keberhasilan tersebut adalah tersusunnya Prosiding Vennas ke-7 AIHII dengan tema “Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional” ini.

Vennas ke-7 AIHII merupakan salah satu pertemuan nasional terbesar dengan jumlah partisipan sebanyak 138 orang yang berasal dari 45 program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia dan perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bila dilihat dari jumlah abstrak yang masuk dapat dikategorikan cukup banyak yaitu 91 abstrak dan 73 di antaranya dipresentasikan di dalam pertemuan ilmiah. Pada akhirnya, jumlah artikel lengkap (full paper) yang berhasil dihimpun dalam prosiding ini sebanyak 40 artikel ilmiah.

Sebagai salah satu kegiatan tahunan, pertemuan ilmiah Vennas merupakan wahana yang ditunggu-tunggu oleh komunitas epistemik HI di Indonesia. Dalam pertemuan ilmiah ini dipresentasikan berbagai penelitian terbaru dan pemikiran mutakhir para penstudi HI di Indonesia dalam menganalisis berbagai fenomena HI yang terjadi di dunia. Banyak pemikiran menarik terutama tentang maritim Indonesia ditelaah dari sudut pandang Ilmu HI.

Pertemuan ilmiah ini sekaligus menjadi ajang *knowledge sharing* dan *knowledge creation* yang pada akhirnya mengerucut pada pencarian intelektual tentang kajian HI yang memiliki ciri khas ke-Indonesiaan. Yaitu, sebuah cara pandang yang berpijak pada identitas, budaya, kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia atas tafsir fenomena HI yang terjadi. Dengan demikian, analisis tersebut dapat menawarkan sesuatu kebaruan dalam khasanah HI di tataran global; bukan sekedar replikasi sudut pandang HI global atau kalangan “Barat” (*western*) terhadap apa yang terjadi dan dikaitkan dengan posisi dan peran Indonesia.

Perjalanan menuju hal tersebut tentu masih panjang. Banyak perdebatan dapat muncul dari berbagai kalangan komunitas epistemik HI Indonesia. Namun, jalan menuju ke sana telah dirintis dan mari terus kita kembangkan demi kemajuan AIHII dan bangsa Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih

kepada seluruh panitia Vennas ke-7 AIHII, para pengurus AIHII, anggota AIHII, Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan para pihak yang telah membantu terselenggaranya Vennas ke-7 AIHII ini dengan sukses.

Jakarta, 1 Desember 2016

Ketua Umum Pengurus Pusat
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Prof. Dr. Tirta N. Mursitama, PhD



Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya kepada kita semua dalam pelaksanaan Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) yang berjalan sukses dan berhasil menerbitkan Buku Prosiding ini. Konvensi kali ini mengangkat tema “**Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional**”. Prosiding ini memuat rangkuman singkat mengenai materi yang dibahas oleh para narasumber dalam Seminar Nasional, dan juga memuat seluruh makalah yang dipresentasikan pada Sidang Akademik dalam rangkaian Konvensi Nasional VII AIHII di Makassar, 23 November 2016.

Tema ini dipilih dengan dasar pemikiran bahwa topik kemaritiman telah menjadi isu hangat pada level nasional maupun global. Pada level nasional, isu maritim menjadi sentral karena visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini membuka ruang bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Indonesia.

Sidang Akademik Konvensi Nasional VII terbagi dalam 4 (empat) sub tema, yaitu: (1) Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional; (2) Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN; (3) Keamanan, Demokrasi dan Masyarakat Transnasiona; dan (4) Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, juga terdapat forum akademik dengan tema khusus, yaitu “Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE)”, dan *National Integrity System and Anti Corruption*.

Selain presentasi akademik, Konvensi Nasional VII juga diisi dengan beberapa kegiatan yang merupakan ajang pertemuan organisasi AIHII. Dalam sidang organisasi, dibahas berbagai isu keilmuan dan proses akademik di perguruan tinggi setiap anggota AIHII, mendiskusikan alternatif pengembangan, dan juga upaya-upaya untuk memperkuat organisasi.

Prosiding menyajikan seluruh makalah yang dipresentasikan selama konvensi. Seluruh penyaji pada kegiatan ini adalah peneliti Hubungan Internasional yang sebagian besarnya merupakan dosen program studi Hubungan Internasional dari 45 universitas anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Akhir kata, kami dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII),

sponsor kegiatan, para penyaji, para peserta dan panitia yang sudah berkenan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Kami berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi niat dan usaha baik kita semua.

Makassar, 1 Desember 2016

Ketua Departemen Hubungan Internasional
FISIP Universitas Hasanuddin

H. Darwis, Ph.D



Pengantar Editor

Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia

Ishaq Rahman

Head of Editorial Board (Universitas Hasanuddin, Makassar)

ishaq@fisip.unhas.ac.id

Konvensi ini mengambil tema “Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional”. Tema ini dipilih dengan dua pertimbangan. Pertama, isu benua maritim saat ini sedang menjadi salah satu fokus perhatian para penstudi hubungan internasional, baik nasional maupun internasional. Pada level nasional, langkah Presiden Joko Widodo yang menjadikan tema maritim sebagai fokus kebijakan pembangunan saat ini telah mendorong peningkatan kajian dalam berbagai bidang.

Kedua, tema maritim merupakan isu hangat dalam hubungan internasional yang banyak mewarnai arah kebijakan negara-negara di dunia, yang dengan sendirinya membuka ruang kajian lebih luas dan variatif bagi para penstudi ilmu hubungan internasional. Pada tataran regional Asia Timur dan Tenggara, isu klaim berlapis terhadap Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang menempatkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai aktor penting, beririsan dengan fenomena kebangkitan Tiongkok dalam interaksi global.

Prosiding ini menyajikan gagasan dan pemikiran dari para penstudi hubungan internasional dari seluruh Indonesia. Secara sistematis, pembagian bahasan dalam prosiding ini mengacu pada pengelompokan paper yang dipresentasikan pada konvensi. Masing-masing sub tema dalam prosiding ini menggambarkan karakter akademik yang saat ini sedang berkembang dalam kajian hubungan internasional di Indonesia.

Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional

Demokrasi sedang menjadi trend global, terutama dalam 25 tahun terakhir. Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, dunia internasional telah menyaksikan transisi demokrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, hingga fenomena Arab Spring yang terjadi pada penghujung 2011. Dalam konteks

demokrasi, gagasan tentang keamanan juga mengalami pergeseran makna dari keamanan wilayah (*territorial security*) menuju keamanan manusia (*human security*), dan setelah peristiwa 9/11, menuju *pre-emptive security*. Bahkan, pada banyak negara-negara yang bertransisi kini sedang terjadi fenomena pertukaran (*tradeoff*) antara keamanan dan demokrasi (Pavone, Gomez, dan Jaquet-Chivelle, 2016). Gejolak keamanan tampak terjadi pada negara-negara yang bertransisi, meskipun pada level ancaman yang berbeda-beda dan variasi eskalasi yang dinamis.

Prosiding ini menyajikan variasi gagasan tentang keamanan, demokrasi, dan masyarakat transnasional dengan pendekatan yang beragam. Mulai dari gagasan tradisional tentang keamanan wilayah, hingga gagasan kontemporer tentang keamanan siber. Adi Rio Arianto (halaman 18) bahkan melihat realitas ini bukan saja sebagai isu keamanan siber *an sich*, tetapi telah menjangkau dimensi-dimensi geopolitik dan keseimbangan arsitektur keamanan global, melalui apa yang dia istilahkan sebagai "geometripolitika", suatu gagasan yang belum kita temukan dalam literatur mainstream. Arianto mengulas bagaimana level rasionalitas, kapabilitas, dan probabilitas senjata nuklir sebagai instrumen pemusnah massal disandingkan dengan ancaman perang siber yang lebih kontemporer.

Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional

Dinamika pemikiran teoritik dalam hubungan internasional masih terus mencari bentuk yang aplikatif dan dapat memberi penjelasan memuaskan terhadap peristiwa-peristiwa internasional. Epistemologi ilmu nampaknya semakin kokoh dengan diterimanya kesepahaman diantara para pengkaji bahwa tidak ada satu teori dan metodologi tunggal yang mampu mengayomi kompleksitas studi ini. Maka, karakter perkembangan teori akan selalu mengikuti perkembangan, yang sesuai dengan karakter ilmu-ilmu sosial secara umum.

Ada gejala "kembali"-nya pencarian metodologi terhadap aspek-aspek sosial, kultural, dan historis yang sempat diabaikan. Gagasan yang dituangkan Rizal A. Hidayat (halaman 225) menelaah pendekatan teori sosiologi sejarah dalam penelitian hubungan internasional. Anggapan pendekatan ini sebagai "*the second class theory*" sepertinya menarik untuk ditelaah kembali. Pada dekade 1990-an, beberapa peneliti sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan pendekatan sosial murni terhadap kajian hubungan internasional, seperti karya Yosef Lapid dan Friedrich V. Kratochwil (ed) yang berjudul: "The Return of Culture and Identity in International Relations Theory" (1996).



Pencarian pendekatan alternatif untuk menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional telah dimulai sejak akhir dekade 1980-an. Nicholas Greenwood Onuf memperkenalkan *konstruktivisme* dalam "World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and Internasional Relations" (1989), dan secara intensif dan konsisten dipromosikan oleh Alexander Wendt melalui serangkaian artikel dan buku. Emil Radhiansyah dan Tatok D. Sudiarto (halaman 51) mencoba melakukan telaah terhadap keputusan arbitrase pengadilan internasional mengenai Laut China Selatan dengan mengadopsi gagasan konstruktivis. Begitu juga Ali Maksum (halaman 215) menggunakan pendekatan alternatif ini untuk menjelaskan isu-isu kontemporer di Asia Tenggara.

Ekonomi Politik Benua Maritim

Pendekatan ekonomi politik internasional sejak Adam Smith, John Stuart Mill, atau Immanuel Kant (dengan gagasan klasik tentang liberalisme ekonomi) maupun ide-ide tentang interdependensi yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph S. Nye, hingga pendekatan globalisasi yang antara lain diusung oleh Anthony Giddens, Thomas L. Friedman, dan puluhan akademisi dan penulis, nampaknya masih menjadi sentrum kajian, baik yang bersifat promotif maupun kritis. Sementara itu, perspektif kontemporer sebagaimana ditawarkan oleh Benjamin Jerry Cohen (yang membagi tegas antara perspektif Amerika dan Inggris) masih kurang memperoleh perhatian dalam kajian ekonomi politik internasional.

Para peneliti dalam konvensi ini didominasi oleh peminatan yang fokus pada peranan negara, kelompok negara-negara (organisasi internasional dan multilateralisme), serta perusahaan multi nasional. A. Irawan J.H (halaman 306) atau Rahmi Fitriyanti (halaman 354) membahas tentang perspektif kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok sesuai dengan karakter strategi pengembangan maritim setiap negara. Sementara Ignatius Ismanto (halaman 324) memilih perspektif multilateral dalam melihat dinamika ekonomi politik di ASEAN.

Dalam pandangan penulis, apa yang disajikan oleh para peneliti dan penstudi hubungan internasional masih bersifat tradisional dan belum berani keluar dari kungkungan perspektif-perspektif klasik ekonomi politik internasional. Tentu saja hal ini sama sekali bukan sesuatu yang salah, sebab pada tingkat global sekalipun pendekatan yang sama masih terjadi. Satu hal yang menarik adalah keberanian untuk menempatkan pendekatan ekonomi politik internasional untuk menelaah fenomena akar rumput, sebagaimana ditunjukkan dalam makalah Sri Suwartiningsih (halaman 374) yang menguraikan tentang ekonomi politik pada

masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tentu saja, kita akan kembali pada perdebatan klasik epistemologi keilmuan tentang obyek kajian studi hubungan internasional. Akan tetapi, sebagaimana penulis kemukakan di atas, selalu ada ruang yang dinamis bagi pendekatan-pendekatan alternatif dalam kajian hubungan internasional.

Perspektif Indonesia

Dari kelima panel yang tersedia, sebagian besar paper terdistribusi pada panel “Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN”. Hal ini menunjukkan bahwa *main stream* perkembangan penelitian di ranah kajian hubungan internasional Indonesia cenderung bersifat *inward looking*, yaitu lebih didominasi oleh upaya pencarian terhadap model kajian dan fokus penelitian yang menunjukkan karakter ke-Indonesia-an. Kekhasan ini juga terlihat dari hadirnya dua makalah yang mencoba mengupas tentang fenomena korupsi dalam perspektif global. Pada satu sisi, fenomena korupsi yang cenderung domestik dianalisis dengan argumen-argumen gerakan global melawan korupsi.

Salah satu kritik yang hingga kini masih mewarnai aplikasi studi hubungan internasional adalah bagaimana *membumikan* kajian ini, terutama menjadikan ilmu ini sebagai kebutuhan aktual masyarakat. Secara tradisional, ulasan atau studi tentang perang dan damai, diplomasi, kerja sama pada forum-forum yang berskala global, dan sebagainya, dinilai sebagai “kebutuhan elit” dibanding “kebutuhan masyarakat”. Di sisi lain, seiring dengan karakter interaksi global yang semakin meluruhkan batas-batas negara dan hambatan-hambatan dalam interaksi antarbangsa, terjadi pula perluasan tema dan fokus penelitian studi ilmu hubungan internasional, hingga mencakup pula tema-tema yang dinilai generik ilmu sosial.

Variasi (keluasan) dan kedalaman tema seperti inilah yang mewarnai fokus prosiding ini, bergandengan dengan isu kajian maritim sebagai tema utama.

Referensi

Vincenzo Pavone, Elvira Santiago Gomez & David-Olivier Jaquet-Chiffelle, “A Systemic Approach to Security: Beyond the Tradeoff between Security and Liberty”, ***Journal of Democracy and Security***, Vol. 12, No. 4, 2016.

Robert Howard Jackson and Georg Sørensen, ***Introduction to International Relations: Theories and Approaches***, 4th Edition. Oxford University Press, 2010.



Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, ***International Organization***, Vol. 46, no. 2, 1992.

Daftar Isi

Dewan Redaksi	iii
Disclaimer	iv
Sambutan Pengurus Pusat AIHI.....	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar Editor.....	ix
Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia	ix
Daftar Isi	xiv
Keynote Speech.....	1
Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si	1
Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani.....	3
Panel 1: Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional	5
Indonesia dalam Arus <i>Multi-track Regionalism</i> Asia Tenggara	7
Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21	18
Peranan Negara Negara Besar di Kawasan Pasifik Barat Daya dalam Percaturan Global	37
Dampak Keputusan Arbitrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan terhadap Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara	51
Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam <i>Global War Against Terrorism</i>	76

The People’s Republic of China Claim of South China Sea on Indonesia Sovereignty (2014 - 2015).....	92
Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus: Konflik Poso)	131
Pengembangan Sistem Senjata Otonom Mematikan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Internasional.....	145
The <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS): A Threat to Indonesia?	161
Menanggulangi Migrasi Ireguler di Laut: Bakamla dan Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia	178
Dimensi Maritim Dalam Isu Ketidakamanan Energi Tiongkok Di Asia Timur	194
Panel 2: Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional	215
Isu-Isu Kontemporer Asia Tenggara: Sebuah Analisa Awal	217
Pendekatan Teori Sosiologi Sejarah (<i>Historical Sociology</i>) Dalam Penelitian Studi Hubungan Internasional.....	227
Studi Pemikiran Tan Malaka Dalam Mengkonstruksi Hubungan Internasional Perspektif Indonesia	244
Pemaknaan Kembali Konsep “Internasional” dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Komparatif Pembangunan Kota Ramah HAM, Kesepakatan Agenda 2030, Perumusan Visi ASEAN 2025 dan Kerja sama Perpajakan Global.....	264
Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Tinjauan Postmodernisme	286
Panel 3: Ekonomi Politik Internasional	305
Beberapa Konsiderasi Kritis bagi Sinergi Poros-Maritim (Indonesia) dan OBOR/ <i>One Belt One Road</i> (Tiongkok)?	307
Ekonomi-Politik Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).....	325
Strategi Peningkatan Ekonomi Negara Maritim Indonesia dalam Prespektif Global	340
Implikasi Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Pembangunan Geoekonomi Maritim Indonesia	355

Ekonomi Politik Pada Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia..	375
Tough Diplomacy on The Sea: Impact of Illegal Fishing on Indonesia-China Relations	393
Jatuhnya Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomatik Saudi Arabia-Amerika Serikat.....	406
Panel 4: Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN.....	418
Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean	420
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Daya Saing Industri Indonesia	439
Diplomasi Budaya dan Penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN.....	458
Menemukan Peran Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Worldview Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2014	473
Analisis Kebijakan Luar Negeri <i>One Door Policy</i> Indonesia Terhadap Bantuan Kemanusiaan Internasional	484
Diplomasi BVK Dalam Menarik Minat Wisatawan Manca Negara Ke Indonesia	498
Track Two of Multi Track Diplomacy: Non Government or Private Sector As A Strategy In Create Prosperity Indonesia Border Area With Malaysia In Facing Human Security Issues	513
Reorientasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara Pasca Runtuhnya Rezim Soeharto.....	532
Multikulturalisme sebagai Pembentuk Gaya Diplomasi Indonesia dan Pengaruhnya Di ASEAN	556
Diplomasi Ekonomi dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia	573
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Konektivitas ASEAN (Studi Kasus: Di Masa Pemerintahan Jokowi)....	599
Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara	622
Diplomasi Batik Indonesia di Era MEA.....	633

Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara, Piagam ASEAN Serta Upaya Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015: Kasus Peradilan Khmer Merah di Kamboja (2005-2015)	647
Laut Indonesia Sebagai Magnet Asia dan Dunia.....	671
Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan	689
Quo Vadis Organisasi Internasional? Studi Kasus Peran ASEAN dalam Pencemaran Udara Lintas Batas di Asia Tenggara	710
Panel 5: National Integrity System and Global Anti-corruption	729
Diplomasi Anti Korupsi: Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	731
Analisis Integritas Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Liberalisasi Pelayanan Dalam Bidang Hukum di Indonesia.....	746

Keynote Speech

Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si

Isu maritim menjadi penting dalam kajian Hubungan Internasional karena konsep kekuatan maritim (*maritime power concept*) dapat dihitung secara matematis. Kekuatan maritim suatu negara merupakan kombinasi dari faktor geografi, kapabilitas ekonomi, kapabilitas militer, kapabilitas teknologi, serta tujuan strategis kekuatan maritim suatu negara dan keinginan negara tersebut untuk menjalankan strategi maritim. Kekuatan maritim juga merupakan instrumen utama dalam kebijakan militer, yang juga menjadi salah satu potensi ekonomi suatu negara (khususnya sebagai sumber energi dan batas wilayah).

Terdapat lima Pilar Maritim Indonesia, yaitu budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim. Konsep benua maritim memiliki keterkaitan dengan transformasi geo-maritim di Indonesia, terutama dalam konteks nusantara yang mengembangkan integrasi nasional dalam konteks kedaulatan. Selain itu, Indonesia tengah melakukan reorientasi pembangunan yang bertumpu pada laut, mengingat posisi Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia, sebagai salah satu *checkpoint* yang terpenting di dunia, dimana lebih dari 40% dari total perdagangan dunia melalui perairan di Indonesia. Selat Malaka, misalnya, memiliki kapasitas *deadweight tonnage* sebesar 300,000 dwt, dimana angka ini lebih besar dari Terusan Suez dan Terusan Panama. Ini berarti bahwa Selat Malaka memungkinkan lebih banyak barang yang diangkut dibandingkan kedua terusan tadi.

Kompetisi politik global juga semakin kuat dimana dua pengaruh besar dunia pada saat ini, AS dan Tiongkok, semakin memfokuskan pengaruhnya pada perairan dunia, khususnya Laut China Selatan (LCS). Ini disebabkan karena pendulum geopolitik dan geoekonomi yang telah bergeser ke kawasan Asia, 70% perikanan dunia berada di Asia Pasifik, 30% produk perikanan dunia dipasok dari Indonesia, dan 10% dari tangkapan ikan dunia berada di kawasan LCS. Jalur transportasi laut kawasan Asia pun dianggap semakin penting, mengingat total nilai kargo yang mencapai USD 5 triliun per tahun.

Dalam membangun kemitraan maritim, diperlukan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi, serta prioritas kerjasama internasional maupun regional. Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas ekonomi maritim dunia, tetapi juga penyangga maritim kawasan. Di samping itu, yang dapat menjadi prioritas Indonesia dalam kerjasama internasional maritim antara lain adalah *maritime governance* (pembangunan kapasitas), *maritime civil and criminal authority* (penegakan hukum), *maritime defense* (kerjasama keamanan), *maritime safety* (keamanan lingkungan dan negosiasi), *maritime response and recovery* (pencarian dan penyelamatan di laut), serta *maritime economy* (transportasi dan perdagangan).

Speaker Bio: Abdul Rivai Ras

Perwira yang telah melalui berbagai penugasan mulai dari tingkat operasional sampai pada tingkat kebijakan strategis. Ia mengikuti pendidikan Perwira Karier ABRI Angkatan I dan melanjutkan berbagai pendidikan kedinasan militer dan non militer di dalam dan luar negeri, dengan pendidikan tertinggi di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional pada Elliot School of International Affairs, George Washington University. Ia menempuh pendidikan non-militer program pascasarjana Manajemen Operasional-Strategik, Kajian Ketahanan Nasional, Ilmu Politik Hubungan Internasional dan program doctoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia.



Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani

Tantangan utama hubungan internasional di ASEAN adalah kehadiran pihak asing. China semakin memperkuat eksistensinya ASEAN dengan upaya membangun navigasi dan fasilitas keamanan di wilayah archipelago serta garis laut Indonesia, setelah baru-baru ini membangun pelabuhan di Sri Lanka. Aktor besar lain seperti AS juga hadir dengan menempatkan pangkalan militer dan sekutunya di sekeliling posisi silang dunia, dengan menjadikan Indonesia sebagai target strategis. Oleh karena itu, dalam menghadapi pembangunan geopolitik dan geostrategis di kawasan ini, Indonesia memerlukan *grand strategy* yang sinergis dan komprehensif mengenai kerangka diplomasi AS dan China, dan dalam waktu bersamaan tetap menjaga sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan lain adalah penanganan terorisme masa kini dan mendatang. Jaringan Al-Qaeda semakin merambah berbagai penjuru dunia, dengan tujuan utama menghapuskan pengaruh amerika dari Iraq dan Semenanjung Arab, menghapuskan pemerintah di kawasan tersebut, membasmi Israel dan pengaruh Yahudi dan Kristen, dan memperluas kekuasaan Islam di dunia. Untuk itu, perlu adanya perencanaan dan manajemen pertahanan yang tepat dalam menjawab tantangan ini, yang tercermin dalam politik luar negeri dan keamanan nasional.

Permasalahan batas-batas maritim dan pulau-pulau terluar Indonesia juga menjadi tantangan lain Indonesia dan ASEAN dalam lima tahun ke depan. Hingga saat ini terdapat 95 pulau dengan status pulau terdepan atau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, termasuk di dalamnya 12 pulau yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena dikhawatirkan akan diokupasi pihak asing, seperti pulau Miangas, Marampit, Sekatung, Rondo, Dana, Fanildo, dan Batek. Diharapkan adanya *multilayer defense system* (dengan medan pertahanan penyanggah) dalam menjawab tantangan ini, dimana pada pulau-pulau terluar tersebut, dan pada wilayah perbatasan.

Tantangan terakhir adalah optimalisasi keterlibatan daerah-daerah di Indonesia dalam Komunitas ASEAN paska tahun 2015. Keterlibatan pemerintah daerah dirasa penting mengingat terdapat banyak dasar hukum kerjasama daerah dengan luar negeri. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur mengenai aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hubungan luar negeri. Bahkan lebih khusus lagi, pemerintah Jawa Barat, misalnya, telah mengeluarkan

beberapa peraturan daerah seperti Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Diharapkan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan Komunitas ASEAN lima tahun ke depan, khususnya kepentingan Indonesia di ASEAN.

Yanyan Mochamad Yani

Dilahirkan di Bandung, pada tanggal 5 Oktober 1966. Jenjang Strata 1 (Drs) diraih dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (1990). Penulis meraih gelar Strata 2, MA in International Relations (MAIR) dari Flinders University, Australia (2000) melalui beasiswa "Australian Development Scholarship", memperoleh gelar Strata 3, Ph.D in International Relations dari Auckland University, New Zealand (2004) melalui beasiswa "New Zealand Official Development Assistance (NZODA) Study Awards".



Yanyan adalah guru besar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, juga pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana UNPAD, dan Dosen Luar Biasa di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan, Bandung. Berbagai tulisan artikel dan makalah tentang Hubungan Internasional telah dipublikasikan di berbagai media cetak nasional maupun internasional.



Diterbitkan oleh:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin
Gedung FISIP UNHAS, Lt. 3
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90243
Telp/Fax: +62 411 585024 | e-mail: vennas7aihii@gmail.com

Supervisi oleh: **Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII)**